Bulan :

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	2

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Republika

Banggar DPRD DKI Tetapkan APBD Rp 82,5T

JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyepakati angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 82,5 triliun.

Ketua Banggar DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, angka tersebut merupakan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan di Hotel Grand Cempaka, Kabupaten Bogor pada 31 Oktober-3 November 2022.

Meski begitu, kata dia, angka itu turun dari usulan awal sebesar Rp 85,57 triliun. "Disepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan plafon prioritas anggaran sementara sebesar Rp 82,5 triliun untuk kemudian dapat disetujui (di rapat paripurna)," ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (5/11).

Setelah melalui pembahasan selanjutnya, kata dia, KUA PPAS APBD 2023 akan memasuki tahapan penandatangan kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

"Berdasarkan pasal 16 ayat 6, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Agenda-agenda selanjutnya akan segera kita jadwalkan melalui rapat Bamus (DPRD DKI)," kata politikus PDIP tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri menjelaskan, nilai yang dihasilkan dalam rapat tersebut, setara dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 82.543.539.889.450. Dengan demikian, kata dia, jumlah pendapatan dan jumlah belanja dari Pemprov DKI dinilai seimbang.

"Ini setara dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan, yaitu sebesar Rp 82.543.539.889.450 sehingga sudah imbang antara pendapatan dan belanja," kata Edi.

Angka tersebut merupakan hasil sinkronisasi dari aspirasi TPAD yang mengusulkan rancangan KUA PPAS APBD 2023 kepada Banggar DPRD DKI sebesar Rp 85,57 triliun. Dalam usulannya, TAPD memproyeksikan pendapatan di sepanjang 2023 sebesar Rp 77,44 triliun. Angka itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp 57,23 triliun, pendapatan transfer Rp 16,93 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 3,27 triliun, serta dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 8,12 triliun yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 6,70 triliun, dan penerimaan pinjaman daerah Rp 1,42 triliun.

Sedangkan postur belanja, memiliki nilai Rp 77,37 triliun yang diproyeksikan untuk belanja operasi Rp 63,17 triliun, belanja modal Rp 10,64 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp 3,19 triliun, dan belanja transfer Rp 356,44 miliar. Selain itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 8,19 triliun yang terdiri dari penyertaan modal daerah (PMD) Rp 6,23 triliun, pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 1,78 triliun, dan pemberian pinjaman daerah Rp 176 miliar. ■ antara **ed:** erik purnama putra